



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

MANAGEMENT RISIKO **SEKRETARIAT DPRD**

TAHUN 2024

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Sumber Data		Renstra Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis		Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	
Sasaran Strategis		Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%
	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis:	1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	
	Sasaran Strategis:	1. Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	
	IKU Strategis:	1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	
	Program:	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota-Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003


Form 2.c.1
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%
	2	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%
	3	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	5	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	6	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 6. Layanan Administrasi DPRD		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan 2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum 3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5. Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD		
<p>Denpasar, 2 Januari 2024</p> <p>Sekretaris DPRD Kota Denpasar</p>  <p>Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM NIP. 196811141998031003</p>			

Form 2.c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Sumber Data		Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024	
Tujuan Strategis		Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	
Program		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
	2	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
	3	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%
	4	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
	5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
	6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
	7	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
	Kegiatan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Fasilitasi Tugas DPRD 	
	Keluaran/Hasil Kegiatan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 4. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD 	

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : Periode RENSTRA 2021-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD								
	Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	RSO.24.34.03.01	Sekretaris DPRD	Kurangnya motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Terdapat pegawai yang tidak mencapai target kinerja	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1) Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD 2) Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya fasilitasi pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.24.34.03.02	Sekretaris DPRD	1. Pelaku pelayanan kurang aktif memberikan kuesioner kepada pengguna layanan 2. Pemilik pelayanan belum optimal melakukan monev secara berkala 3. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam penyusunan/pengelolaan administrasi pelayanan	Internal	C	Capaian indeks kepuasan standar pelayanan kesekretariatan DPRD tidak tercapai	Sekretariat DPRD

Denpasar, 2 Januari 2024
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar


 Ir. Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 1 Januari - 31 Desember 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan DPRD
 Sasaran Strategis OPD : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Program:											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	RSO.24.34.03.01	Sekretaris DPRD	Kurangnya motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	Sekretariat DPRD
Kegiatan:											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Perencanaan	Kurang anggaran pembayaran gaji ASN	ROO.24.34.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	1. Bendahara gaji kurang cermat menyusun perhitungan kebutuhan gaji 2. Bendahara gaji kurang memahami sistem gaji 3. Terdapat pegawai mutasi	Internal	C	Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan pernyataan palsu pada saat pengisian model C yg berakibat kelebihan pembayaran tunjangan keluarga	RF.24.34.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 3. Data base kepegawaian tidak update	Internal	C	1. Berpotensi menurunkan integritas dan kinerja Bendahara Gaji 2. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.02	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Belum optimalnya reward dan punishment	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara / kelebihan pembayaran gaji	Sekretariat DPRD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.02	Kabag Umum dan Keuangan	1. Belum Optimalnya penetapan anggaran kas dengan penyelesaian pengadaan barang/jasa 2. Proses pengadaan barang/jasa membutuhkan proses yang panjang karena Kompetensi SDM terbatas 3. Proses pemenuhan syarat TKDN/PDN pada pengadaan barang/jasa	Internal	C	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	RF.24.34.03.03	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Pelaksanaan	Kekurangan anggaran untuk kebutuhan jasa penunjang urusan Pemda	ROO.24.34.03.03	Kabag Umum dan Keuangan	1. Penerimaan surat Undangan / Surat Pemberitahuan / usulan yang membutuhkan pendanaan. Namun, baru disampaikan pada tahun berjalan 2. Belum optimal pencerematan / koordinasi antara pejabat berwenang / perencanaan dengan stakeholder	Eksternal	UC	Kebutuhan jasa penunjang sebagaimana dimaksud tidak difasilitasi / ditunda prosesnya	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	RF.24.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.06	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemeliharaan / perbaikan / perawatan BMD	ROO.24.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	1. Pengurus Barang belum optimal melakukan pemeliharaan rutin terhadap pemakaian BMD 2. Terbatasnya pegawai yang memahami proses pemeliharaan BMD 3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi untuk inventarisasi barang	Internal	C	BMD berpotensi rusak dan kekurangan anggaran akibat biaya pemeliharaan BMD meningkat	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat tahap pemilihan penyedia	RF.24.34.03.07	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Pelaksanaan pemeliharaan berpotensi tidak dilakukan sesuai spesifikasi order / kebutuhan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.08	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan	Pengadaan pakaian dan atribut DPRD 2024-2029 tertunda/tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	Proses fitting pakaian dinas menunggu penetapan calon terpilih dari KPU	Eksternal	UC	Penerimaan pakaian dan/atau atribut secara lengkap DPRD setelah pelantikan DPRD	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan pernyataan/ dokumen palsu sebagai bukti pendukung pemberian tunjangan	RF.24.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bendahara gaji terhadap dokumen bersangkutan	Internal	C	Berpotensi mengalami kelebihan pembayaran gaji anggota dewan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Pelaksanaan	Belum optimalnya fasilitas rapat paripurna dan fraksi DPRD	ROO.24.34.03.06	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Belum optimalnya penganggaran kebutuhan fasilitas rapat 2. Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi rapat paripurna	Internal	C	Capaian keuangan tidak sesuai target	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitas Rapat Fraksi dan Paripurna DPRD	RF.24.34.03.11	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.12	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
	Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1) Persentase Kepuasan Layanan Kasekretariat DPRD 2) Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Pelaksanaan	Belum optimalnya fasilitas pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.24.34.03.02	Sekretaris DPRD	1. Pelaku pelayanan kurang aktif memberikan kuesioner kepada pengguna layanan 2. Pemilik pelayanan belum optimal melakukan monev secara berkala 3. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam penyusunan/pengelolaan administrasi pelayanan	Internal	C	Capaian indeks kepuasan standar pelayanan kasekretariat DPRD tidak tercapai	Sekretariat DPRD
	Kegiatan:										
7	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pelaksanaan	Penyelesaian pembahasan ranperda insiatif tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Penyampaian dokumen naskah akademis yang disusun oleh tim penyusun Ranperda tidak tepat waktu 2. Penyampaian draft Ranperda oleh eksekutif tidak tepat waktu 3. Terdapat beberapa kali pembahasan ranperda insiatif yang menyebabkan revisi berkali-kali	Eskternal	UC	Tidak tercapai target propemperda yang sudah ditetapkan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitas tugas Bapemperda DPRD	RF.24.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.14	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
8	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pelaksanaan	Fasilitas proses penetapan Ranperda APBD tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.08	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Tidak tepat waktunya hasil evaluasi Ranperda APBD dari Gubernur disampaikan ke DPRD	Internal	C	Pelaksanaan APBD menjadi tertunda	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Badan Anggaran DPRD	RF.24.34.03.15	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.16	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
9	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Pelaksanaan	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD	ROO.24.34.03.09	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi kegiatan pengawasan DPRD dalam penyusunan administrasi kegiatan	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi DPRD	RF.24.34.03.17	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.18	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Perencanaan	Kekurangan jumlah pendamping pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	ROO.24.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	Kurang cermatnya perhitungan anggaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Bimtek DPRD, Audiensi DPRD, dan Bamus DPRD, serta fasilitasi penyediaan Kelompok Pakar AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD	RF.24.34.03.19	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.20	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
11	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan	Proses pencairan pendanaan kegiatan terlambat	ROO.24.34.03.11	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Pegawai yang bertugas memfasilitasi belum optimal memberikan pemahaman kepada penyedia / pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan administrasi secara tepat waktu	Internal	C	Capaian realisasi keuangan tidak tepat waktu	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Reses DPRD	RF.24.34.03.21	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.22	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
12	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	ROO.24.34.03.12	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik dalam penyusunan administrasi kegiatan	Internal	C	Belum optimalnya pencapaian kinerja	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Badan Kehormatan DPRD	RF.24.34.03.23	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.24	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
13	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Perencanaan	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	ROO.24.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi tugas DPRD	Internal	C	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	RF.24.34.03.25	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.26	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

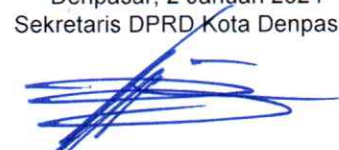
I. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
	NIHIL				
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat DPRD				
1	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	RSO.24.34.03.01	2	1	2
2	Belum optimalnya fasilitasi pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.24.34.03.02	2	1	2
III	Risiko Operasional OPD : Sekretariat DPRD				
1	Kurang anggaran pembayaran gaji ASN	ROO.24.34.03.01	1	2	2
2	Penyusunan pernyataan palsu pada saat pengisian model C yg	RF.24.34.03.01	2	1	2
3	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.02	2	1	2
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.02	1	2	2
5	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.03	2	1	2
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.04	2	1	2
7	Kekurangan anggaran untuk kebutuhan jasa penunjang urusan	ROO.24.34.03.03	1	2	2
8	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat	RF.24.34.03.05	2	1	2
9	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.06	2	1	2
10	Belum optimalnya pemeliharaan / perbaikan / perawatan BMD	ROO.24.34.03.04	1	2	2
11	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat	RF.24.34.03.07	2	1	2
12	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.08	2	1	2
13	Pengadaan pakaian dan atribut DPRD 2024-2029 tertunda/tidak	ROO.24.34.03.05	1	2	2
14	Penyusunan pernyataan/ dokumen palsu sebagai bukti	RF.24.34.03.09	2	1	2
15	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.10	2	1	2
16	Belum optimalnya fasilitasi rapat paripurna dan fraksi DPRD	ROO.24.34.03.06	1	2	2
17	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat	RF.24.34.03.11	2	1	2
18	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	RF.24.34.03.12	2	1	2
19	Penyelesaian pembahasan ranperda insiatif tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.07	1	2	2
20	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.13	2	1	2
21	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.14	2	1	2
22	Fasilitasi proses penetapan Ranperda APBD tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.08	1	2	2
23	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.15	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
24	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.16	2	1	2
25	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD	ROO.24.34.03.09	1	2	2
26	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.17	2	1	2
27	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.18	2	1	2
28	Kekurangan jumlah pendamping pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	ROO.24.34.03.10	1	2	2
29	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.19	2	1	2
30	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.20	2	1	2
31	Proses pencairan pendanaan kegiatan terlambat	ROO.24.34.03.11	1	2	2
32	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.21	2	1	2
33	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.22	2	1	2
34	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	ROO.24.34.03.12	1	2	2
35	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan	RF.24.34.03.23	2	1	2
36	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.24	2	1	2
37	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	ROO.24.34.03.13	1	2	2
38	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	RF.24.34.03.25	2	1	2
39	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran	RF.24.34.03.26	2	1	2

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar


Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
NIHIL						
II	Risiko Strategis OPD : Sekretariat DPRD					
1	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	RSC.24.34.03.01	2	Sekretaris DPRD	Kurangnya motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Terdapat pegawai yang tidak mencapai target kinerja
2	Belum optimalnya fasilitasi pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.24.34.03.02	2	Sekretaris DPRD	1. Pelaku pelayanan kurang aktif memberikan kuesioner kepada pengguna layanan 2. Pemilik pelayanan belum optimal melakukan monev secara berkala 3. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam penyusunan/pengelolaan	Capaian indeks kepuasan standar pelayanan kesekretariatan DPRD tidak tercapai

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional OPD : Sekretariat DPRD					
	Kurang anggaran pembayaran gaji ASN	ROO.24.34.03.01	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Bendahara gaji kurang cermat menyusun perhitungan kebutuhan gaji	Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN
	Penyusunan pernyataan palsu pada saat pengisian model C yg berakibat kelebihan pembayaran tunjangan keluarga	RF.24.34.03.01	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 3. Data base kepegawaian tidak update	1. Berpotensi menurunkan integritas dan kinerja Bendahara Gaji 2. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.02	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Belum optimalnya reward dan punishment	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara / kelebihan pembayaran gaji
	Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.02	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Belum optimalnya penetapan anggaran kas dengan penyelesaian pengadaan barang/jasa	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target
	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	RF.24.34.03.03	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.04	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Kekurangan anggaran untuk kebutuhan jasa penunjang urusan Pemda	ROO.24.34.03.03	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Penerimaan surat Undangan / Surat Pemberitahuan / usulan yang membutuhkan pendanaan. Namun, baru disampaikan pada tahun berjalan	Kebutuhan jasa penunjang sebagaimana dimaksud tidak difasilitasi / ditunda prosesnya
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	RF.24.34.03.05	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.06	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Belum optimalnya pemeliharaan / perbaikan / perawatan BMD	ROO.24.34.03.04	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Pengurus Barang belum optimal melakukan pemeliharaan rutin terhadap pemakaian BMD 2. Terbatasnya pegawai yang memahami	BMD berpotensi rusak dan kekurangan anggaran akibat biaya pemeliharaan BMD meningkat
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat tahap pemilihan penyedia	RF.24.34.03.07	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Pelaksanaan pemeliharaan berpotensi tidak dilakukan sesuai spesifikasi order / kebutuhan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.08	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Pengadaan pakaian dan atribut DPRD 2024-2029 tertunda/tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.05	2	Kabag Umum dan Keuangan	Proses fitting pakaian dinas menunggu penetapan calon terpilih dari KPU	Penerimaan pakaian dan/atau atribut secara lengkap DPRD setelah pelantikan DPRD
	Penyusunan pernyataan/ dokumen palsu sebagai bukti pendukung pemberian tunjangan	RF.24.34.03.09	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bendahara gaji terhadap dokumen bersangkutan	Berpotensi mengalami kelebihan pembayaran gaji anggota dewan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.10	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Belum optimalnya fasilitasi rapat paripurna dan fraksi DPRD	ROO.24.34.03.06	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Belum Optimalnya penganggaran kebutuhan fasilitasi rapat 2. Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi rapat paripurna	Capaian keuangan tidak sesuai target
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Rapat Fraksi dan Paripurna DPRD	RF.24.34.03.11	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.12	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Penyelesaian pembahasan ranperda insiatif tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.07	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Penyampaian dokumen naskah akademis yang disusun oleh tim penyusun Ranperda tidak tepat waktu 2. Penyampaian draft Ranperda oleh	Tidak tercapai target propemperda yang sudah ditetapkan
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Bapemperda DPRD	RF.24.34.03.13	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.14	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Fasilitasi proses penetapan Ranperda APBD tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.08	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Tidak tepat waktunya hasil evaluasi Ranperda APBD dari Gubernur disampaikan ke DPRD	Pelaksanaan APBD menjadi tertunda
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Badan Anggaran DPRD	RF.24.34.03.15	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.16	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD	ROO.24.34.03.09	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi kegiatan pengawasan DPRD dalam penyusunan administrasi kegiatan	Belum optimalnya pencapaian kinerja
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi DPRD	RF.24.34.03.17	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.18	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Kekurangan jumlah pendamping pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	ROO.24.34.03.10	2	Kabag Umum dan Keuangan	Kurang cermatnya perhitungan anggaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Belum optimalnya pencapaian kinerja

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Bimtek DPRD, Audiensi DPRD, dan Bamus DPRD, serta fasilitasi penyediaan Kelompok Pakar AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD	RF.24.34.03.19	2	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.20	2	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Proses pencairan pendanaan kegiatan terlambat	ROO.24.34.03.11	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Pegawai yang bertugas memfasilitasi belum optimal memberikan pemahaman kepada penyedia / pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan administrasi secara tepat	Capaian realisasi keuangan tidak tepat waktu
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Reses DPRD	RF.24.34.03.21	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.22	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	ROO.24.34.03.12	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik dalam penyusunan administrasi kegiatan	Belum optimalnya pencapaian kinerja
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Badan Kehormatan DPRD	RF.24.34.03.23	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.24	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	ROO.24.34.03.13	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi tugas DPRD	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	RF.24.34.03.25	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan
	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.26	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

Form 6
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Denpasar

Tahun Penilaian : 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
	Nihil				
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
	Nihil				
III	Kepemimpinan yang Kondusif				
	Nihil				
IV	Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
	Nihil				
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
	Nihil				
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
	Nihil				
VII	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
	Nihil				
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
	Nihil				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Denpasar, 2 Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

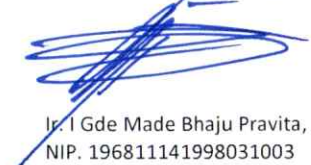


I. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda			Nihil			
II	Risiko Strategis OPD			Nihil			
II	Risiko Operasional OPD			Nihil			

Denpasar, 2 Januari 2024
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
NIHIL							

Denpasar, 2 Januari 2024
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Jr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
NIHIL						

Denpasar, 2 Januari 2024
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2024								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan DPRD								
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1							NIHIL			
	<i>Masalah/Risiko Baru</i>									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	RSO.24.34.03.01		Kurangnya motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Terdapat pegawai yang tidak mencapai target kinerja		optimalisasi dialog kinerja dan monev berkala	Triwulan I - IV		
2	Belum optimalnya fasilitasi pelayanan tugas dan fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.24.34.03.02		1. Pelaku pelayanan kurang aktif memberikan kuesioner kepada pengguna layanan 2. Pemilik pelayanan belum optimal melakukan monev secara berkala 3. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam penyusunan/pengelolaan administrasi pelayanan	Capaian indeks kepuasan standar pelayanan kesekretariatan DPRD tidak tercapai		optimalisasi dialog kinerja dan monev berkala	Triwulan I - IV		
	<i>Masalah/Risiko Baru</i>									
III	Risiko Operasional OPD									
1	Kurang anggaran pembayaran gaji ASN	ROO.24.34.03.01		1. Bendahara gaji kurang cermat menyusun perhitungan kebutuhan gaji 2. Bendahara gaji kurang memahami sistem gaji 3. Terdapat pegawai mutasi	Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN		Melakukan rekonsiliasi kebutuhan gaji secara berkala	Triwulan I - IV		
2	Penyusunan pernyataan palsu pada saat pengisian model C yg berakibat kelebihan pembayaran tunjangan keluarga	RF.24.34.03.01		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 3. Data base kepegawaian tidak update	1. Berpotensi menurunkan integritas dan kinerja Bendahara Gaji 2. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN		1. Perbaharuan Model C dan Pakta Integritas ASN secara berkala 2. Rekonsiliasi Gaji berkala	Triwulan I - IV		
3	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.02		1. Lemahnya pengawasan 2. Belum optimalnya reward dan punishment	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara / kelebihan pembayaran gaji		1. Optimalisasi penggunaan SIMAKDIHATI untuk monitoring kinerja pegawai ASN 2. Penerbitan Surat pemanggilan kepada ASN yang melanggar kode Etik / mengimplementasikan sistem reward & punishment berdasarkan capaian kinerja	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.02		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya penetapan anggaran kas dengan penyelesaian pengadaan barang/jasa 2. Proses pengadaan barang/jasa membutuhkan proses yang panjang karena Kompetensi SDM terbatas 3. Proses pemenuhan syarat TKDN/PDN pada pengadaan barang/jasa 	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjenjangan kinerja pada bagian umum dan keuangan 2. Monev berkala 3. Penetapan SPT Admin Pembantu Pengadaan dengan memanfaatkan SDM yang tersedia 4. Koordinasi yang intensif dengan disperindag / mengusulkan surat permohonan rekomendasi PDN 	Triwulan I - IV		
5	Terjadi gratifikasi pada saat penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD	RF.24.34.03.03		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 2. pencermatan/penelitian anggaran secara berkala dan bersifat pembahasan terbuka bersama TAPD 	Triwulan I - IV		
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.04		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah 	Triwulan I - IV		
7	Kekurangan anggaran untuk kebutuhan jasa penunjang urusan Pemda	ROO.24.34.03.03		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan surat Undangan / Surat Pemberitahuan / usulan yang membutuhkan pendanaan. Namun, baru disampaikan pada tahun berjalan 2. Belum optimal pencermatan / koordinasi antara pejabat berwenang / perencana dengan stakeholder 	Kebutuhan jasa penunjang sebagaimana dimaksud tidak difasilitasi / ditunda prosesnya		<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan pergeseran anggaran selama membutuhkan anggaran - Melakukan dialog kinerja 	Triwulan I - IV		
8	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan jasa penunjang kantor	RF.24.34.03.05		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 2. pencermatan/penelitian anggaran secara berkala dan bersifat pembahasan terbuka bersama TAPD 	Triwulan I - IV		
9	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.06		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah 	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
10	Belum optimalnya pemeliharaan / perbaikan / perawatan BMD	ROO.24.34.03.04		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Barang belum optimal melakukan pemeliharaan rutin terhadap pemakaian BMD 2. Terbatasnya pegawai yang memahami proses pemeliharaan BMD 3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi untuk inventarisasi barang 	BMD berpotensi rusak dan kekurangan anggaran akibat biaya pemeliharaan BMD meningkat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan Penjadwalan pemeliharaan BMD 2. Mengupdate secara rutin inventarisasi pemeliharaan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inventarisasi pemeliharaan BMD 3. Dialog kinerja dalam rangka pembagian tugas pengelolaan BMD 	Triwulan I - IV		
11	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat tahap pemilihan penyedia	RF.24.34.03.07		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Pelaksanaan pemeliharaan berpotensi tidak dilakukan sesuai spesifikasi order / kebutuhan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan internalisasi pekerjaan 2. Penyusunan KAK / HPS / RAB secara jelas sebelum proses pengadaan 3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan BMD 4. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang 5. Melakukan epurchasing untuk pengadaan pemeliharaan 	Triwulan I - IV		
12	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.08		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah 	Triwulan I - IV		
13	Pengadaan pakaian dan atribut DPRD 2024-2029 tertunda/tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.05		Proses fitting pakaian dinas menunggu penetapan calon terpilih dari KPU	Penerimaan pakaian dan/atau atribut secara lengkap DPRD setelah pelantikan DPRD		Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder beserta KPU	Triwulan I - IV		
14	Penyusunan pernyataan/ dokumen palsu sebagai bukti pendukung pemberian tunjangan	RF.24.34.03.09		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bendahara gaji terhadap dokumen bersangkutan 	Berpotensi mengalami kelebihan pembayaran gaji anggota dewan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi Gaji 2. Membuat Pakta Integritas 3. Membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji 4. Penguatan internalisasi pekerjaan dengan atasan langsung 	Triwulan I - IV		
15	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.10		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi 	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah 	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
16	Belum optimalnya fasilitasi rapat paripurna dan fraksi DPRD	ROO.24.34.03.06		1. Belum Optimalnya penganggaran kebutuhan fasilitasi rapat 2. Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi rapat paripurna	Capaian keuangan tidak sesuai target		1. Peningkatan kapasitas SDM melalui PKS/Workshop/Bimtek 2. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 3. Monev berkala 4. Penjenjangan kinerja di bagian agar pekerjaan dapat terbagi habis dan memanfaatkan SDM yang tersedia dengan optimal	Triwulan I - IV		
17	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Rapat Fraksi dan Paripurna DPRD	RF.24.34.03.11		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
18	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.12		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
19	Penyelesaian pembahasan ranperda insiatif tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.07		1. Penyampaian dokumen naskah akademis yang disusun oleh tim penyusun Ranperda tidak tepat waktu 2. Penyampaian draft Ranperda oleh eksekutif tidak tepat waktu 3. Terdapat beberapa kali pembahasan ranperda inisiatif yang menyebabkan revisi berkali-kali	Tidak tercapai target propemperda yang sudah ditetapkan		1. Optimalisasi koordinasi dengan stakeholder dan tim penyusun ranperda inisiatif 2. Monev berkala	Triwulan I - IV		
20	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Bapemperda DPRD	RF.24.34.03.13		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
21	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.14		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
22	Fasilitasi proses penetapan Ranperda APBD tidak tepat waktu	ROO.24.34.03.08		Tidak tepat waktunya hasil evaluasi Ranperda APBD dari Gubernur disampaikan ke DPRD	Pelaksanaan APBD menjadi tertunda		Berkoordinasi dengan BPKAD / TAPD untuk percepatan proses evaluasi gubernur	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
23	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Badan Anggaran DPRD	RF.24.34.03.15		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
24	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.16		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdu pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
25	Belum optimalnya fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD	ROO.24.34.03.09		Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi kegiatan pengawasan DPRD dalam penyusunan administrasi kegiatan	Belum optimalnya pencapaian kinerja		1. Peningkatan kapasitas SDM melalui PKS/Workshop/Bimtek 2. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 3. Monev berkala 4. Penjurangan kinerja di bagian agar pekerjaan dapat terbagi habis dan memanfaatkan SDM yang tersedia dengan optimal	Triwulan I - IV		
26	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Komisi DPRD	RF.24.34.03.17		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
27	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.18		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdu pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
28	Kekurangan jumlah pendamping pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	ROO.24.34.03.10		Kurang cermatnya perhitungan anggaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Belum optimalnya pencapaian kinerja		Monev berkala	Triwulan I - IV		
29	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Bimtek DPRD, Audiensi DPRD, dan Bamus DPRD, serta fasilitasi penyediaan Kelompok Pakar AKD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD	RF.24.34.03.19		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
30	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.20		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdu pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
31	Proses pencairan pendanaan kegiatan terlambat	ROO.24.34.03.11		Pegawai yang bertugas memfasilitasi belum optimal memberikan pemahaman kepada penyedia / pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan administrasi secara tepat waktu	Capaian realisasi keuangan tidak tepat waktu		1. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Monev berkala 3. Pemberian list kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses pertanggungjawaban keuangan	Triwulan I - IV		
32	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Reses DPRD	RF.24.34.03.21		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
33	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.22		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdu pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
34	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	ROO.24.34.03.12		Belum optimalnya kompetensi SDM memfasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik dalam penyusunan administrasi kegiatan	Belum optimalnya pencapaian kinerja		1. Peningkatan kapasitas SDM melalui PKS/Workshop/Bimtek 2. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 3. Monev berkala 4. Penjenjangan kinerja di bagian agar pekerjaan dapat terbagi habis dan memanfaatkan SDM yang tersedia dengan optimal	Triwulan I - IV		
35	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi Badan Kehormatan DPRD	RF.24.34.03.23		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
36	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.24		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
37	Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	ROO.24.34.03.13		Terbatasnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi tugas DPRD	Capaian realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai target		1. Peningkatan kapasitas SDM melalui PKS/Workshop/Bimtek 2. Penguatan internalisasi dengan atasan langsung 3. Monev berkala 4. Penjenjangan kinerja di bagian agar pekerjaan dapat terbagi habis dan memanfaatkan SDM yang tersedia dengan optimal	Triwulan I - IV		
38	Terjadi benturan kepentingan dalam pengadaan pada saat penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	RF.24.34.03.25		1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi realisasi pengadaan tidak efisien atau terdapat pemborosan		1. Penguatan internalisasi dan monev berkala 2. Pencermatan / Penelitian RKA secara berulang dan dilakukan secara terbuka 3. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan integritas pejabat berwenang	Triwulan I - IV		
39	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.34.03.26		1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara		1. Melakukan survei / mini kompetisi sebelum melakukan negosiasi barang/jasa 2. Penguatan internalisasi antar pejabat berwenang 3. Peningkatan kompetensi verifikator dan pejabat berwenang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sisdur pengelolaan keuangan daerah	Triwulan I - IV		
Masalah/Risiko Baru										

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

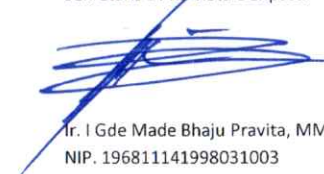
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 2 Januari 2024

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003